



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indogos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Alokasikan Dana Rp 3,9 Triliun untuk KJP Plus

Anak putus sekolah mendapat bantuan mulai tahun depan.

Linda Hairani

linda.nairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta akan mengalokasikan dana Rp 3,9 triliun untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Mulai tahun depan, pemerintah Jakarta pun akan membagikan KJP Plus kepada anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu.

Peaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Ewo Bianto, mengatakan, meski ada tambahan kategori penerima KJP Plus, akses dananya tak berubah banyak dibanding tahun ini. Sebab, kala dia, verifikasi calon penerima KJP Plus akan diperketat.

Di samping KJP Plus untuk anak usia sekolah, Dinas Pendidikan juga menyediakan dana Rp 150 miliar untuk mahasiswa dari keluarga tak mampu. Bantuan sosial bernama Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul itu sudah berjalan dua tahun. Penerimaannya diutamakan mereka yang pernah menerima KJP saat bersekolah.

Dana Rp 3,9 triliun, menurut Ewo, dialokasikan untuk 872 ribu penerima KJP Plus tahun depan. Dalam realisasinya, jumlah penerima KJP Plus bergantung pada pendaftar serta hasil verifikasi. Sebagai pembanding, pada semester pertama tahun ini, penerima KJP Plus berjumlah 805 ribu orang, dengan serapan anggaran sekitar Rp 1,82 triliun.

Untuk menjamin penya-



Warga melakukan pembayaran dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat membeli kebutuhan sekolah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, 2 Juli 2018.

luan KJP Plus tepat sasaran, menurut Ewo, pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan akan dilakukan tiap semester. Hal itu dilakukan lantaran kondisi perekonomian keluarga siswa kemungkinan berubah. "Kami tak mungkin berharap seseorang miskin selamanya," kata dia.

Dinas Pendidikan juga akan menggunakan Basis Data Terpadu milik Dinas Sosial sebagai dasar penyaluran dana KJP Plus. Basis data tersebut, antara lain, memuat identitas warga Jakarta yang tergolong tak mampu. Selama ini, pendataan hingga pencairan dana KJP diurus sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan.

Di sekolah, pendaf-taran

penerima KJP Plus melewati sejumlah tahap. Tahap pertama, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke wali kelas. Tim sekolah kemudian mengunjungi tempat tinggal siswa untuk memastikan. Bila siswa dianggap layak, kepala sekolah akan membuat rekomendasi untuk penyaluran surat keterangan tak mampu dari kelurahan. Terakhir, kepala sekolah membuat persetujuan daftar penerima KJP Plus.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan DKI Jakarta, Nandiana, mengatakan sistem verifikasi berulang memungkinkan penerima KJP Plus pada semester pertama

tidak lagi menerima bantuan pada semester kedua. Ada pula kemungkinan orang baru menerima KJP Plus pada semester kedua. "Bicara kemiskinan itu dinamis, ada yang membaik dan pasti," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Ramly Muhammad, mengatakan verifikasi berulang diperlukan lantaran komisinya kerap menerima keluhan masyarakat ihwal KJP Plus. Keluhannya mulai dari mereka yang merasa layak tapi tak menerima KJP Plus hingga percobaan dana yang terlambat. "Harus ada inovasi soal verifikasi ini," kata dia.

• H. YUSUF HARUNING

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Alokasikan Dana Rp 3,9 Triliun untuk KJP Plus

Yang 'Dibayar' Agar Pintar

Tahun depan, warga Ibu Kota yang putus sekolah bisa mendapat jatah dana Kartu Jakarta Pintar Plus, asalkan memenuhi persyaratan, dan melanjutkan sekolah. Pemerintah DKI Jakarta kembali mengalokasikan triliunan rupiah.

Dana cair dua tahap dalam setahun. Siswa di lembaga pendidikan swasta juga mendapat bantuan tambahan uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan per bulan.

ALOKASI DANA KJP PLUS

> 2017

Alokasi anggaran: Rp 3,32 triliun untuk 832 ribu orang
 Realisasi penyerapan: Rp 3,17 triliun untuk 778 ribu orang

> 2018

Alokasi anggaran: Rp 3,9 triliun untuk 872 ribu orang
 Realisasi penyerapan semester I: Rp 1,82 triliun untuk 805 ribu orang

PENERIMA

- > Warga Jakarta yang tidak mampu
- > Berusia 6-21 tahun
- > Bersekolah atau pun tidak bersekolah

PERUNTUKAN

- > Ongkos dan uang saku (tunai)
- > Perlengkapan sekolah (non-tunai)

FASILITAS PENDUKUNG:

- > Transjakarta gratis
- > Masuk Ancol gratis
- > Pangan murah
- > Masuk museum gratis
- > Masuk Monas dan Ragunan gratis

NILAI KJP PLUS

Jenjang	Jatah per bulan	Bisa dibelanjakan per bulan	SPP untuk sekolah swasta
SD/MI/SLE	Rp 250.000	Rp 135.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 185.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 235.000	Rp 290.000
SMK	Rp 450.000	Rp 235.000	Rp 240.000
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Rp 300.000	Rp 185.000	

PENGUNAAN KJP PLUS

- > Alat kesehatan
- > Apotek
- > Toko buku
- > Toko busana/sepatu
- > Supermarket
- > Department store
- > Optik
- > Alat tulis
- > Kesehatan olahraga
- > Ekstrakurikuler yang tak dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan

SUMBER: WWW.BANGKARA, DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA

LINDA RAIRANI